



MUCHTAR ALI YUSUF  
BUPATI BULUKUMBA



H. A. EDY MANAF, S.Sos  
WAKIL BUPATI BULUKUMBA

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( RLPPD )

### KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2021

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( RLPPD ) adalah Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui Media Cetak dan Media Elektronik.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Opini atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah dan Inovasi Daerah.

Ringkasan LPPD akan menjadi bahan masukan bagi Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kami sampaikan RLPPD kepada masyarakat sebagai berikut :

#### A. PENDAHULUAN

Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan upaya pembangunan, peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba :

##### ❖ Visi :

***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF, YANG BERKARAKTER KEARIFAN LOKAL MENUJU BULUKUMBA MAJU DAN SEJAHTERA”***

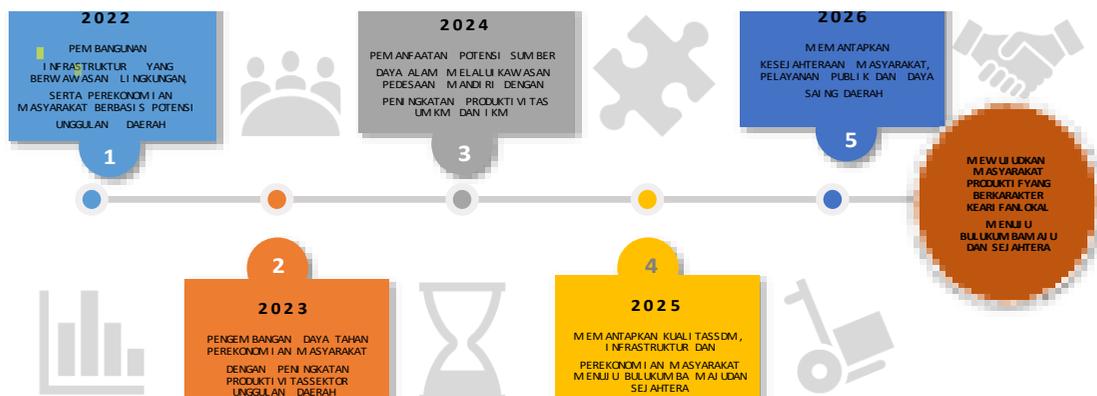
##### ❖ Misi :

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam Masyarakat.
2. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik.
3. Mewujudkan tata kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan Ekspor.
4. Meningkatkan Produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara
8. Pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.
9. Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah.
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

12. Penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 ( lima ) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 ( lima ) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut tema pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 - 2026 :

**Tema Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 - 2026**



**B. CAPAIAN KINERJA MAKRO TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,99	69,62	0,91 %
2	Angka Kemiskinan	7,10	7,43	0,33 %
3	Angka Pengangguran	3,42	3,14	-0,28 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,43	4,76	4,33 %
5	Pendapatan Per Kapita	33,28 Juta	36,06 Juta	8,35%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,371	0,362	-2,43%

Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

**C. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR**

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 14.580. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 14.855	98,15	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 48.402. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 48.771.	99,24	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 23.527 Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 24.314.	96,76	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 4.778. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 5.402.	88,45	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 305. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 448.218.	0,68	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1. Jumlah RS di kabupaten/kota = 1.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.960. Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 5.960.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 7.394. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 7.394.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6.855. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 6.855.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 21.502. Jumlah balita di kabupaten/kota = 21.502	100	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 3.746 . Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 3.746	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 6.895. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 39.429.	17,49	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 21.093. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 21.093.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 14.737. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 14.737.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.477. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 5.477.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 612. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 612.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 547. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 547.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko yang terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 7.223. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 7.223.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas	0	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
		WS Kewenangan Kab/Kota	kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0.		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0.	0	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 17.657. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 17.657.	84,94	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 109.608. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 116.438.	94,13	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 92.398. Jumlah rumah di Kabupaten A = 115.166.	80,23	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 2.725. Jumlah IMB yang berlaku = 2.725.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 810.078. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota =	70,58	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
Pelayanan Dasar			1.147.719.		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 415. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 500.	83,00	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 211. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 211.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0.	0	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni= 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan= 0.	0	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 7,40. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 110.78.	6,68	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 8.387. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 115.166.	7,28	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 96. Jumlah unit rumah kab/kota = 96.	100	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 313. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 313.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 15. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = 15.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	175.807	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.304	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	372	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 82. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 82.	100	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	7 menit	
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	16,67	

Kategori Urusan	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Ket.
		pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	panti = 25. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 150.		
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 98. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 98.	100	

#### D. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

##### a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	TAHUN	PREDIKAT	SKOR
1	2020	Dalam Proses Evaluasi	
2	2021	Dalam Proses Evaluasi	

##### b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO	TAHUN	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2020	Wajar Dengan Pengecualian	WDP
2	2021	Wajar Tanpa Pengecualian	WTP

#### E. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

##### 1. REALISASI PENERIMAAN

###### a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021

PAD	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	55.393.554.842,00	37.864.015.321,70	68,35
Pendapatan Retribusi Daerah	23.686.685.156,00	16.578.048.350,00	69,99
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.484.250.536,00	4.544.098.364,00	101,33
Lain-Lain PAD yang Sah	119.522.450.947,00	94.250.049.418,22	78,86
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>203.086.941.481,00</b>	<b>153.236.211.453,92</b>	<b>75,45</b>

###### b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021

Dana Perimbangan	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	17.500.844.000,00	22.699.643.147,00	129,71
Dana Alokasi Umum	659.817.036.000,00	659.817.036.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	148.254.244.000,00	126.747.380.226,00	85,49
Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	149.184.329.800,00	149.337.435.100,00	100,10

<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>974.756.453.800,00</b>	<b>958.601.494.473,00</b>	<b>98,34</b>
-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------

c. *Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2021*

<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Dana Insentif Daerah	18.489.310.000,00	18.489.310.000,00	100,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-
Dana Desa	110.535.651.000,00	108.232.610.800,00	97,92
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>129.024.961.000,00</b>	<b>126.721.920.800,00</b>	<b>98,22</b>

d. *Transfer Pemerintah Antar Daerah Tahun Anggaran 2021*

<b>Transfer Pemerintah Antar Daerah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.891.476.739,00	52.882.286.940,00	84,08
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	9.608.726.240,00	7.096.385.000,00	73,85
<b>Jumlah Transfer Pemerintah Antar Daerah</b>	<b>72.500.202.979,00</b>	<b>59.978.671.940,00</b>	<b>82,73</b>
<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>1.176.281.617.779,00</b>	<b>1.145.302.087.213,00</b>	<b>97,37</b>

e. *Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2021*

<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Pendapatan Hibah	13.630.000.000,00	13.630.000.000,00	100,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	57.654.923.488,00	57.200.036.497,00	99,21
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>71.284.923.488,00</b>	<b>70.830.036.497,00</b>	<b>99,36</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.450.653.482.748,00</b>	<b>1.369.368.335.163,92</b>	<b>94,40</b>

## 2. PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

a. *Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021*

<b>Belanja Operasi</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Pegawai	646.463.836.939,00	630.626.096.501,67	97,55
Belanja Barang dan Jasa	358.653.982.453,00	292.955.107.437,82	81,68
Bunga	-	-	-
Subsidi	-	-	-
Hibah	18.969.686.120,00	16.296.969.000,00	85,91
Bantuan Sosial	2.398.775.500,00	2.314.191.414,00	96,47
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.026.486.281.012,00</b>	<b>942.192.364.353,49</b>	<b>91,79</b>

b. *Belanja Modal Tahun Anggaran 2021*

<b>Belanja Modal</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Tanah	4.118.360.797,00	4.051.802.748,00	98,38
Belanja Peralatan dan Mesin	68.951.426.595,00	61.573.786.655,00	89,30
Belanja Gedung dan Bangunan	66.129.808.962,00	56.683.517.090,00	85,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.821.265.954,00	100.957.754.789,00	70,20
Belanja Aset Tetap lainnya	5.347.523.000,00	4.926.387.480,00	92,12
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>288.368.385.308,00</b>	<b>228.193.248.762,00</b>	<b>79,13</b>

c. *Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021*

<b>Jenis Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Belanja Tak Terduga	319.534.287,00	137.758.263,00	43,11
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>319.534.287,00</b>	<b>137.758.263,00</b>	<b>43,11</b>

d. *Transfer Tahun Anggaran 2021*

Transfer/Bagi Hasil	Anggaran	Realisasi	%
Bagi Hasil Pajak	5.476.394.535,00	3.876.171.460,00	70,78
Bagi Hasil Retribusi	5.713.004.000,00	4.363.506.839,00	76,38
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Transfer/Bagi Hasil</b>	<b>11.189.398.535,00</b>	<b>8.239.678.299,00</b>	<b>73,64</b>

e. *Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021*

Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran	Realisasi	%
Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/kota	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	351.400.000,00	351.400.000,00	100,00
Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi Ke Kabupaten/kota	-	-	-
Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Ke Kabupaten/kota/Desa	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	178.700.494.096,00	176.397.453.900,00	98,71
<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>179.051.894.096,00</b>	<b>176.748.853.900,00</b>	<b>98,71</b>
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>190.241.292.631,00</b>	<b>184.988.532.199,00</b>	<b>97,24</b>
<b>Jumlah Belanja dan Transfer</b>	<b>1.505.415.493.238,00</b>	<b>1.355.511.903.577,49</b>	<b>90,04</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-54.762.010.490,00</b>	<b>13.856.431.586,43</b>	<b>-25,30</b>

f. *Pembiayaan*

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.762.010.490,00	45.535.785.640,96	83,15
Penggunaan Silpa			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	35.100.000.000,00	-	-
Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>89.862.010.490,00</b>	<b>45.535.785.640,96</b>	<b>50,67</b>
Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah daerah Lainnya		-	-

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri Lembaga Keuangan Bank	35.100.000.000,00	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembag Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	-	-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>35.100.000.000,00</b>	-	-
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>54.762.010.490,00</b>	<b>45,535,785,640.96</b>	<b>83,15</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi</b>	-	<b>59.392.217.227,39</b>	-
<b>Koreksi Silpa</b>	-	-	-
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	-	<b>59.392.217.227,39</b>	-

#### F. INOVASI DAERAH

##### *Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bulukumba Tahun 2021*

No	Nama	Unit Kerja	Judul Inovasi	Jenis Penghargaan yang diterima	Tahun
1	ANDI AFRIADI.M. SH, MH	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ramah Adat	Top 30 KIPP Sulsel tahun 2021	2021

#### G. PENUTUP

Demikian Rangkuman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( RLPPD ) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 yang memuat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran , semoga apa yang menjadi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya masyarakat dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

Bulukumba, Oktober 2022

BUPATI BULUKUMBA,



MUCHTAR ALI YUSUF

